

Fraksi Ancam Pecat Anggota

Tanggal	: 2014-02-27
Media	: Suara Karya
Halaman	: 1&15
Wartawan	: Rully
Muatan Berita	: n
Narasumber	: Sutan Bhatoegana (Ketua Komisi VII DPR)
Rubrik	: Halaman Depan
Topik	: Suap SKK Migas

JAKARTA (Suara Karya): Kalangan politikus menampik ihwal kucuran dana tunjangan hari raya (THR) dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas).

Mereka membantah telah menerima kucuran dana itu. Bahkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR mengancam memecat anggotanya di Komisi VII jika terbukti menerima kucuran dana THR dari SKK Migas.

Demikian reaksi kalangan politikus atas pengakuan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM Didi Dwi Sutrisno dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. Dalam persidangan yang berlangsung Selasa lalu itu, Didi mengaku telah menyerahkan uang 140 ribu dolar AS atau sekitar Rp 1,5 miliar yang berasal dari SKK Migas.

Uang sejumlah itu diduga merupakan uang THR yang dialamatkan kepada 47 orang di Komisi VII DPR, mulai dari pimpinan, anggota, hingga staf sekretariat. Didi juga mengaku menyerahkan uang itu kepada Irianto, staf Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat Jhonny Alien Marbun tegas membantah menerima uang THR dari Kementerian ESDM sebesar 2.500 dolar AS, sebagaimana disebutkan Didi. "Pada saat Lebaran, saya ke luar negeri," ujarnya beralasan.

Jhonny juga mengaku tidak mengetahui soal pemberian uang 140.000 dolar AS kepada pimpinan dan anggota Komisi VII DPR pada Ramadhan lalu. "Sudah pasti (tidak terima) karena saya tidak di sini. Siapa yang bagi (uang THR) di Komisi VII DPR karena saya enggak di sini. Enggak mungkin saya dibagi," ujarnya.

Jhonny lantas menantang Didi agar lang-sung menunjuk hidung para penerima uang THR senilai total 140.000 dolar AS itu. "Ranggil Didi. Kalau benar (ada dana) ke Komisi VII DPR, tunjuk hidungnya (para penerima). Jangan asbun (asal bunyi)," katanya.

Bantahan juga diutarakan Ketua F-PKB DPR Marwan Jafar. Tentang itu, dia mengaku sudah mernanggil dua anggota F-PKB di Komisi VII, yaitu Nur Yasin dan Agus Sulistyono, untuk dimintai klarifikasi.

Menurut Marwan, Nur dan Agus bersumpah tidak menerima dana THR dari SKK Migas. Bahkan sekadar mengetahui pun tidak soal pemberian dana THR itu.

"Saya sendiri jelas tidak tahu apa-apa. Itu adalah domain KPK, dan pasti akan terungkap yang sebenarnya. Kalau memang tidak terlibat, tentu tidak ada korelasinya kalau harus diperiksa di pengadilan," ujar Marwan.

Dia menambahkan, F-PKB tak segan-segan akan memecat anggotanya jika terbukti menerima dana THR dari SKK Migas.

"Kalau ada yang terlibat, mereka segera kami berhentikan," ujarnya.

Marwan tak lupa menyatakan bangga bahwa sejauh ini tidak satu pun anggota F-PKB yang terjerat kasus korupsi. Karena itu, dia yakin anggota F-PKB di Komisi VII pun tidak menerima dana THR dari SKK Migas sebagaimana pengakuan Didi Dwi Sutrisno dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana dan stafnya, Irianto, kemarin tidak kelihatan hadir di ruang kerja di gedung DPR Jakarta. Ruang kerja Sutan, kamar nomor 905 di lantai 9 Gedung DPR Nusantara I, Rabu petang dalam kondisi terkunci. Menurut petugas keamanan setempat, Sutan dan stafnya tidak berada di ruangan itu.

Selain Sutan, kalangan anggota Komisi VII juga kemarin tidak terlihat di ruang rapat komisi di lantai dasar Gedung Nusantara I. Di tempat itu hanya tampak beberapa staf yang mondar-mandir dengan aktivitas masing-masing.

Mengenai itu, Johnny Alien Marbun menilai wajar karena sekarang ini tidak ada agenda rapat komisi. "Coba lihat komisi-komisi lain, apa ada (agenda rapat)? Kan yang ada itu (rapat) awal tahun membahas anggaran, RKKL (rencana kerja kementerian dan lembaga), lalu pertanggungjawaban anggaran. Kebetulan, ini juga sudah mendekati masa reses," ujarnya.

Jhony membantah bahwa sebagian besar anggota Komisi VII tidak kelihatan di gedung DPR merupakan dampak kesaksian Didi dan Sutan di persidangan kasus suap Rudi Rubiandini di Pengadilan Tipikor, Selasa lalu.

"Enggak ada hubungannya. Ini kan soal penjadwalan. Jangan dibuat 'seksi' dong. Senin ada (rapat), Selasa ada. Artinya normatif saja," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Sutan mengungkapkan, sebenarnya semula Komisi VII menjadwal rapat dengan Dirjen Anggaran Kemkeu dan Menteri ESDM Jero Wacik. Namun, karena Dirjen Anggaran masih di Paris, Francis, rapat itu diundur.
(Sugandi/Nefan K/Rully)